

Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Hutan Mangrove di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang

F. Y. Devi¹, W. Kurniawati²

^{1,2} Universitas Diponegoro, Indonesia

Article Info:

Received: 31 December 2019

Accepted: 30 June 2020

Available Online: 6 August 2020

Keywords:

Community Participation;
Conservation; Mangrove Forest

Corresponding Author:

Fionita Yuliani Devi
Diponegoro University,
Semarang, Indonesia
Email: fionita1997@gmail.com

Abstract: *Changes in the physical condition of mangrove forests that occur cannot be separated from human intervention, especially the local community. So that community involvement in efforts to conserve mangrove forests is needed. Therefore, the purpose of this research is to find out the participation model in the conservation of mangrove forests as a protected area in Mangunharjo Village, Tugu District, Semarang City. The method used in this study is qualitative, and uses interactive data analysis model techniques. The data used are primary data and secondary data. The results of the study showed that the form of community participation in the Mangunharjo Village was divided into two, namely (1) in the form of ideas, aspirations and inspiration as well as community expertise or skills in the mangrove farming community and the processed mangrove community, (2) in the form of energy as volunteers for the community outside the community in mangrove forest conservation activities. Community motivation to participate in the conservation of mangrove forests is divided into 3 namely psychological motivation, economic motivation, and motivation formed due to the presence of mangrove communities. Stakeholders involved in the conservation of mangrove forests in Mangunharjo Village are divided into several groups namely local communities, governments, non-profit institutions, non-profit organizations and outside communities, that each of these stakeholder groups has different roles from one another. they are interrelated, connected and influential so that they become a model of participation.*

copyright © 2016 TPWK-UNDIP
This open access article is distributed under a
Creative Commons Attribution (CC-BY-NC-SA) 4.0 International license.

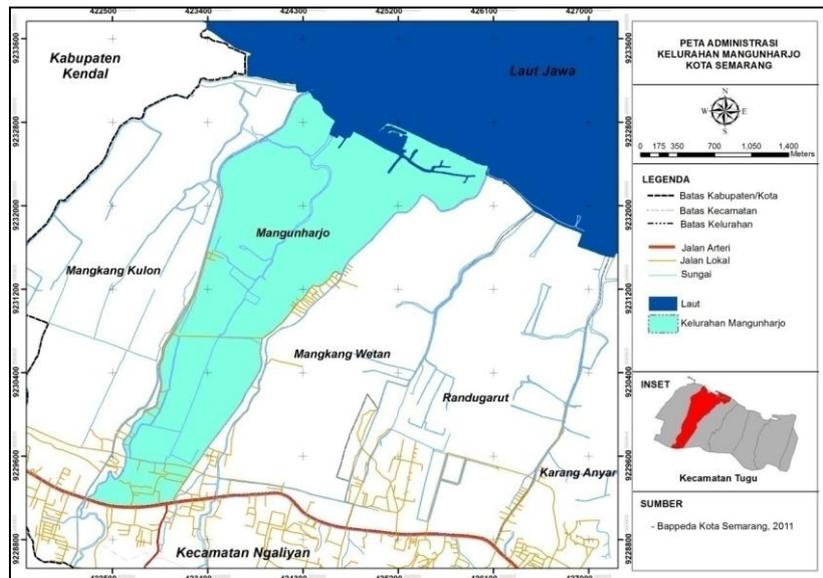
Devi, F. Y., & Kurniawati, W. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Hutan Mangrove di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. *Jurnal Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Dan Kota)*, 9(3), 214–222.

1. PENDAHULUAN

Hutan mangrove merupakan suatu ekosistem yang memiliki fungsi sangat penting bagi lingkungan, salah satunya adalah sebagai peredam dari gelombang, badai angin, abrasi, perangkap sedimen, penahan lumpur yang terbawa oleh aliran air, serta sebagai penyubur tanah dan perairan. Hutan mangrove juga berperan sebagai tempat hidup berbagai macam biota perairan seperti ikan kecil, udang, dan kerang (Bengen 2001). Namun kerusakan ekosistem hutan mangrove sudah menjadi isu global di era saat ini, sehingga mengancam fungsi ekosistem hutan mangrove dan keseimbangan kawasan pesisir. Sekitar 50% lahan mangrove di dunia habis dalam kurun waktu 40 tahun ini (Suryana 2010). Hilang atau rusaknya hutan mangrove secara global dapat dikaitkan dengan pertumbuhan populasi manusia dan pembangunan yang terjadi di daerah pesisir. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perkembangan perkotaan, terjadinya konversi hutan mangrove menjadi kawasan budidaya, dan eksploitasi kayu yang berlebihan (Romañach et al. 2018). Sehingga seiring berkembangnya kota-kota pesisir, ancaman dan tekanan terhadap kerusakan mangrove semakin meningkat pula.

Kota Semarang merupakan kota pesisir Indonesia yang saat ini menjadi salah satu kota paling berkembang Pulau Jawa dan merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah. Tidak dapat dipungkiri bahwa terjadi kerusakan mangrove di Kota Semarang, baik yang disebabkan oleh manusia atau yang terjadi secara alamiah. Kerusakan hutan mangrove di Kota Semarang mulai terjadi pada tahun 1980-1990 akibat penguasaan kawasan hutan mangrove secara ilegal dan dialihfungsikan menjadi tambak udang atau industri. Hingga tahun 2009, pantai di pesisir Jawa Tengah telah mengalami abrasi seluas 5.600 hektar (16%). Angka ini belum termasuk kerusakan terumbu karang sekitar dan lahan bekas galian tambang. Akibat terjadi masalah lingkungan seperti banjir rob, abrasi, penurunan lahan dan intrusi air laut (Wahyudi et al. 2014).

Gambar 1. Lokasi Penelitian (Analisis, 2019)



Kelurahan Mangunharjo merupakan salah satu Kelurahan di Kota Semarang yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan memiliki beberapa hutan mangrove. Kerentanan habitat mangrove di Kelurahan Mangunharjo termasuk ke dalam kategori rendah, namun pada variabel pasang surut kondisi habitat mangrove termasuk kedalam kategori kerentanan tinggi, artinya hutan mangrove rentan rusak akibat pasang surut laut, meskipun faktor lain seperti salinitas dan jenis substrat yang juga mempengaruhi kerentanan hutan mangrove memiliki kisaran kerentanan masih dalam kategori rendah dan sedang (Wahyudi et al. 2014). Sehingga diperlukan adanya tindakan tambahan untuk memastikan kelangsungan hutan mangrove dalam jangka panjang (Alongi 2002). Tindakan atau upaya tersebut dimaksudkan untuk melindungi dan melestarikan keberadaan ekosistem hutan mangrove sehingga akan terjaga fungsi ekosistem mangrove dan keseimbangan kawasan pesisir (Martuti et al. 2018). Salah satu upaya untuk melestarikan ekosistem hutan mangrove adalah dengan dibuatnya kebijakan-kebijakan yang bersifat mengikat oleh pemerintah setempat, seperti kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Semarang terkait pelestarian hutan mangrove tertera didalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031.

Salah satu upaya pelestarian hutan mangrove yang telah dilakukan di Kelurahan Mangrove adalah dibangunnya beton yang difungsikan sebagai penahan gelombang air (Nurhidayati 2017). Upaya pelestarian lainnya seperti penanaman mangrove sudah dilakukan sejak tahun 2010 yang dilakukan melalui kerja sama beberapa *stakeholder* dan CSR (Fatah 2014). Dan agar upaya-upaya tersebut tidak menjadi sia-sia, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan secara berkelanjutan melalui partisipasi aktif dan nyata dari masyarakat pesisir mutlak dilakukan, mengingat bahwa kerusakan hutan mangrove juga disebabkan oleh faktor perilaku manusia (Huda 2008; Gumilar 2018). Partisipasi masyarakat pada era ini terus didorong dan ditingkatkan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah dengan maksud untuk mengurangi beban biaya pembangunan dan menumbuhkan rasa memiliki serta tanggung jawab masyarakat terhadap hasil pembangunan (Gumilar 2018). Dengan adanya rasa tersebut masyarakat akan turut menjaga, memelihara

dan mempertahankan hasil-hasil pembangunan pemerintah, termasuk dalam kebijakan pelestarian hutan mangrove ini.

Adanya beberapa komunitas mangrove di Kelurahan Mangunharjo merupakan suatu bentuk partisipasi masyarakat yang memiliki andil sangat besar dalam pelestarian hutan mangrove dimasa kini maupun di masa yang akan datang. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut, kajian mengenai keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan atau upaya pelestarian hutan mangrove di Kelurahan Mangunharjo perlu dilakukan. Fokus penelitian ini adalah bagaimana proses partisipasi dan peran masyarakat dalam mempengaruhi perubahan kondisi fisik hutan mangrove yang berkaitan dengan upaya pelestarian atau konservasi kawasan lindung di Kelurahan Mangunharjo. Penelitian ini mengkaji model partisipasi pada pelestarian hutan mangrove sebagai kawasan lindung di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan pertimbangan bagi pemerintah dalam penyusunan atau merevisi kebijakan terkait pengelolaan kawasan konservasi khususnya pelestarian hutan mangrove.

2. DATA DAN METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menguraikan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove di Kelurahan Mangunharjo. Dalam penelitian ini, data didapatkan melalui wawancara dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya, observasi, dokumentasi, dan literatur. Cara yang digunakan dalam penentuan informan penelitian ini adalah prosedur purposive yang merupakan strategi dengan menentukan informan sesuai kriteria yang relevan dan sesuai dengan masalah penelitian (Bungin 2011). Digunakan teknik *Snowball Sampling* dalam mendapatkan informan tambahan, menurut Sugiyono dalam (Nurdiani 2014) Teknik *Snowball Sampling* adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan informan atau sumber data yang pada awalnya berjumlah sedikit, namun dikarenakan data yang diperoleh belum lengkap, maka diperlukan adanya tambahan sumber data atau informan. Sehingga didapatkan informan: (1) Edi Mulyanto (Dinas Perikanan Kota Semarang), (2) Benovita Dwi Saraswati (Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah), (3) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, (4) Suharti (Perangkat Kelurahan Mangunharjo), (5) Ali Imron (Komunitas Lembaga Kali Santren), (6) Muffidah (Kelompok Bina Cipta Karya Wanita dan Srikandi Panne), (7) Kukuh Triyanto (Masyarakat yang terlibat dalam pelestarian mangrove), (8) Tabitha Putri (Masyarakat yang terlibat dalam pelestarian mangrove), (9) Fajar Faisal (Masyarakat yang terlibat dalam pelestarian mangrove), (10) Zaky Afka (Kesemat Universitas Diponegoro)

Dalam menganalisis data digunakan model analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Huberman dan Miles dalam (Muhammad 2007), yaitu terdiri dari tiga hal utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga hal utama tersebut merupakan suatu proses siklus dan terjadi secara interaktif, sehingga proses yang dijalankan dalam penelitian ini bergerak bolak-balik diantara ketiga kegiatan tersebut. Dijelaskan menurut Miles & Huberman dalam (Muhammad 2007) dalam proses reduksi data dilakukan pemilahan data mana saja yang dikode, yang tidak digunakan atau dibuang, bagian mana saja yang dapat dilebur menjadi satu atau bagian mana saja yang dapat diringkas, cerita atau data mana yang berkembang. Data hasil wawancara yang telah didapatkan akan dibuat dalam tiga pengodean yaitu *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding* seperti yang disampaikan oleh Strauss dan Corbin (Emzir & Pd 2012). Dalam penelitian digunakan validasi triangulasi seperti menggunakan sumber data yang lebih dari satu atau ganda, menggunakan metode yang lebih dari satu atau ganda, serta menggunakan teori yang berbeda-beda dalam melakukan analisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya konservasi Hutan Mangrove, pemerintah sebagai perencana harus berkolaborasi dengan masyarakat supaya upaya yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien (Dwiyanto 2005). Partisipasi masyarakat yang dimaksud tidak hanya sekedar diberikan sosialisasi atau digerakan dalam suatu kegiatan atau proyek pemerintah, tetapi harus berada pada semua tahapan pengelolaan, yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan juga evaluasi (Peranginangin 2014). Hal ini dimaksud untuk mengarahkan program yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan akhirnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga akan timbul rasa keterpaduan dengan lingkungan serta akan terbangun dukungan publik dalam berjalannya program (UNPAN 2013).

Berdasarkan penelitian ini, pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove telah disadari oleh pihak pemerintah dan juga masyarakat. Masyarakat menyadari betul dampak dan keuntungan dari adanya pelestarian mangrove, selain itu masyarakat juga menyadari bahwa pelestarian mangrove ini sebagai kebutuhan mereka sendiri sebagai masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan dari pelestarian hutan mangrove suatu wilayah, karena dengan adanya partisipasi masyarakat akan menimbulkan rasa kepemilikan sehingga masyarakat akan turut menjaga dan enggan untuk merusak.

Bentuk Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk yang dapat menggambarkan atau merepresentasikan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove di Kelurahan Mangunharjo. Menurut hasil penelitian ini, partisipasi masyarakat lebih banyak dalam komunitas atau kelompok-kelompok mangrove. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa tengah berikut.

Komunitas-komunitas mangrove yang ada di Kelurahan Mangunharjo hingga saat ini memang menjadi wadah bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pelestarian hutan mangrove. Selain itu adanya komunitas ini telah mempermudah pemerintah dalam melaksanakan dan mencapai tujuan program pemerintah khususnya pada bidang pelestarian mangrove. Terdapat beberapa komunitas petani mangrove di Kelurahan Mangunharjo, berdasarkan penelitian ini beberapa diantaranya adalah Kelompok Tani Istiqomah, Sentosa Abadi, dan Komunitas Mangrove Lestari. Terdapat pula kelompok wanita pengolah hasil mangrove yaitu Kelompok Bina Citra Karya Wanita yang memproduksi makanan atau camilan mangrove dan Kelompok Srikandi Pantura yang memproduksi batik mangrove.

Gambar 2. Batik Mangrove Kelompok Srikandi Pantura
(Dokumentasi Penulis, 2019 dan solopos.com, 2018)



Menurut penelitian yang dilakukan di Kelurahan Mangunharjo ini, masyarakat mengikuti pelestarian mangrove melalui beberapa kegiatan atau acara seperti penanaman mangrove, bersih-bersih pantai, pembibitan mangrove dalam komunitas, mengikuti sosialisasi dan penyuluhan, serta memproduksi olahan dan batik mangrove dalam komunitas. Untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut tidak dibutuhkan syarat tertentu atau khusus serta dibuka secara umum. Seperti yang telah dikatakan diawal bahwa peran masyarakat lebih banyak dalam komunitas, sehingga peran masyarakat diluar komunitas sebagian besar adalah sebagai relawan pada kegiatan-kegiatan pelestarian mangrove.

Gambar 3. Kegiatan Penanaman Mangrove dan Bersih-Bersih Pantai
(jatengtoday.com, 2018 dan bpbd.semarangkota.go.id, 2019)



Maka dari kegiatan-kegiatan pelestarian mangrove tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat di Kelurahan Mangunharjo terbagi menjadi dua, yang pertama yaitu berupa buah pikiran, aspirasi dan inspirasi serta keahlian atau keterampilan masyarakat yang disalurkan melalui komunitas petani mangrove dan komunitas olahan hasil mangrove. Bentuk partisipasi yang kedua berupa tenaga sebagai relawan bagi masyarakat diluar komunitas dalam kegiatan-kegiatan pelestarian hutan mangrove.

Motivasi Partisipasi Masyarakat

Dalam melakukan suatu kegiatan, setiap manusia pasti memiliki motivasi atau sesuatu yang menjadi alasan dan dorongan dilakukannya kegiatan tersebut oleh. Pada kasus penelitian ini, dalam berpartisipasi pada suatu kegiatan, masyarakat juga memiliki motivasi yang mendorong mereka untuk melakukan kegiatan tersebut. Motivasi yang dimiliki satu individu akan berbeda dengan yang dimiliki individu lainnya, dan hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor yang melatar belakungnya. Menurut Djamarah (2002) dalam (Mandasari & Maesaroh 2016) ada tiga fungsi motivasi dalam suatu perbuatan, yaitu sebagai pendorong perbuatan, penggerak perbuatan, dan sebagai pengarah perbuatan.

Alasan masyarakat melakukan pelestarian hutan mangrove terbagi menjadi tiga, yang pertama adalah masyarakat sadar akan fungsi dan pentingnya pelestarian mangrove bagi lingkungan dan masyarakat sendiri. Hal ini dilatarbelakangi oleh kejadian di masa lalu atau sejarah yang terjadi di wilayah pesisir Kelurahan Mangunharjo. Seperti yang disampaikan oleh informan 3 Bapak Ali Imron (Ketua Komunitas Lembaga Kali Santren) bahwa kejadian masa lalulah yang membuat masyarakat menjadi sadar akan perlunya melakukan pelestarian mangrove. Alasan masyarakat melakukan pelestarian yang kedua adalah karena adanya ajakan dari teman, rekan dan kerabat. Masyarakat selama ini mengetahui kegiatan pelestarian yang akan dilakukan melalui media sosial dan ajakan dari teman atau kerabat. Sedangkan alasan yang ketiga adalah karena adanya komunitas-komunitas mangrove. Seperti yang ada di penelitian (Manaf et al. 2018) bahwa Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) yang merupakan lembaga masyarakatlah yang menjadi motivator bagi masyarakat setempat dalam berpartisipasi pada pertumbuhan dan pengembangan pariwisata di Nglanggeran. Komunitas dan kelompok mangrove yang ada di Kelurahan Mangunharjo juga menjadi motivator bagi masyarakat untuk melestarikan hutan mangrove. Selain itu komunitas-komunitas inilah yang mengatur dan mengelola masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove.

Selain ketiga alasan yang sudah dipaparkan sebelumnya, berdasarkan penelitian ini terdapat 3 keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat setelah mengikuti kegiatan pelestarian mangrove. Keuntungan-keuntungan ini juga menjadi alasan bagi masyarakat dalam melakukan pelestarian mangrove. Keuntungan yang pertama adalah keuntungan ekonomi, namun keuntungan ekonomi ini hanya dirasakan oleh sebagian warga saja. Selain itu keuntungan ekonomi juga didapatkan oleh komunitas petani mangrove yang mengembangkan pembibitan mangrove, serta komunitas wanita yang memproduksi hasil olahan mangrove. Keuntungan yang kedua adalah keuntungan secara individu, dimana terdapat kepuasan pribadi dalam diri warga setelah berpartisipasi dalam pelestarian mangrove, karena mereka merasa senang, bertambahnya teman dan pengalaman. Dan keuntungan yang terakhir adalah keuntungan yang dirasakan oleh keseluruhan masyarakat yaitu tercapainya tujuan dari pelestarian hutan mangrove.

Menurut Taher (1987) dalam (Huraerah 2008) motif seseorang dalam melakukan suatu perbuatan individu maupun kelompok terbagi menjadi lima, yaitu motif psikologi, sosial, keagamaan, ekonomi dan politik. Berdasarkan pembagian tersebut, motivasi masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove di Kelurahan Mangunharjo dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu motivasi psikologi dan motivasi ekonomi. Berikut adalah bagan yang menggambarkan motivasi masyarakat tersebut.

Peran Stakeholder dalam Pelestarian Hutan Mangrove

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, *stakeholder* yang terlibat dalam pelestarian hutan mangrove di Kelurahan Mangunharjo terbagi menjadi 5 yaitu masyarakat lokal, pemerintah, lembaga nirlaba, institusi nirlaba, dan masyarakat luar. Masing-masing kelompok *stakeholder* ini memiliki peran yang berbeda satu sama lain, dan peran tersebut akan dijabarkan dalam analisis ini. Tabel berikut ini menjelaskan kontribusi atau keterlibatan *stakeholder* tersebut dalam pelestarian hutan mangrove Kelurahan Mangunharjo.

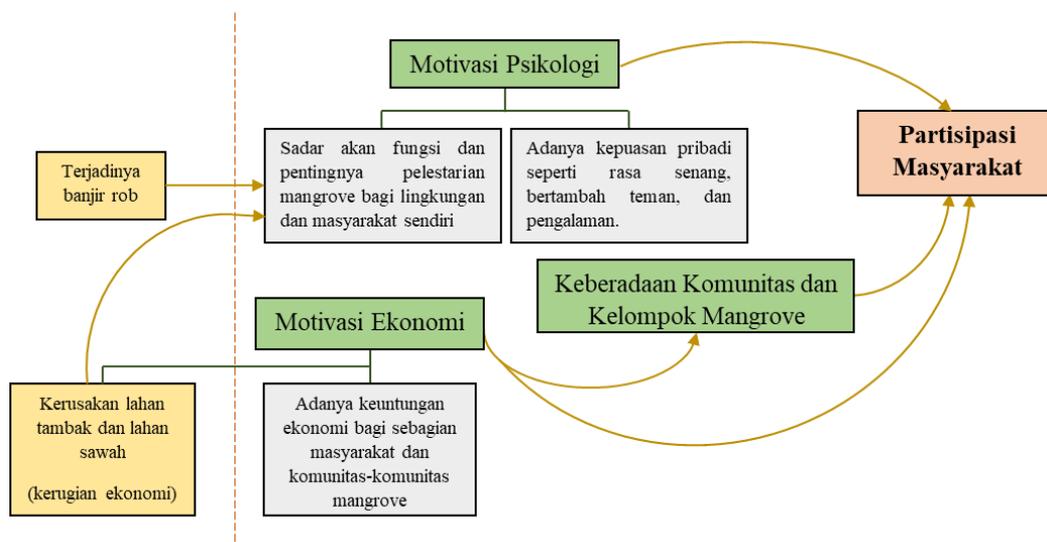
Model Partisipasi pada Pelestarian Hutan Mangrove

Murdick, Ross, & Claggett (1984) mengemukakan bahwa model merupakan aproksimasi atau penyimpulan (*abstraction*) dari suatu sistem nyata dalam berbagai bentuk (Sugiarta 2015). Model partisipasi yang digunakan pada pelestarian hutan mangrove Kelurahan Mangunharjo ini berbentuk model informasi. Model yang digunakan adalah model dalam bentuk atau wujud bagan yang akan berfungsi multidimensi pada objek, hubungan dan operasi pelestarian hutan mangrove. Sehingga model tersebut dapat merepresentasikan sistem partisipasi yang sesungguhnya terjadi pada pelestarian hutan mangrove dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman atau pengertian sistem yang sesungguhnya. Model ini dibuat berdasarkan analisis-analisis yang telah dilakukan sebelumnya dalam penelitian ini.

Adanya peningkatan yang baik pada kondisi hutan mangrove di Kelurahan Mangunharjo merupakan hasil kerjasama atau kolaborasi yang telah dilakukan oleh *stakeholder* terkait dengan masing-masing perannya. Pemerintah sebagai penanggung jawab atas pelestarian hutan mangrove memiliki peran sebagai regulator dan administrator bagi lembaga nirlaba, institusi nirlaba, masyarakat lokal dan luar. Pemerintah juga berperan sebagai pembentuk dan pembimbing masyarakat lokal, khususnya pada komunitas mangrove dan Pokmaswas. Selain itu pemerintah juga berperan sebagai fasilitator bagi masyarakat lokal maupun luar dan berperan sebagai donatur dalam beberapa kegiatan lembaga nirlaba dan masyarakat lokal. Lembaga nirlaba berperan sebagai fasilitator bagi masyarakat lokal maupun luar ketika menyelenggarakan acara dan menjadi donator dalam pelestarian mangrove. Lembaga nirlaba juga berperan sebagai inovator, pembentuk dan pembimbing bagi masyarakat lokal khususnya pada kelompok pengolah hasil mangrove.

Institusi nirlaba memiliki peran yang hampir serupa dengan lembaga nirlaba, yaitu sebagai fasilitator bagi masyarakat lokal dan luar ketika menyelenggarakan dan menjadi donator dalam acara atau kegiatan pelestarian hutan mangrove di Kelurahan Mangunharjo. Masyarakat lokal merupakan *stakeholder* yang memiliki peran paling penting dan paling banyak dalam pelestarian hutan mangrove di Kelurahan Mangunharjo, dimana masyarakat lokal berkontribusi secara langsung dalam kegiatan-kegiatan pelestarian mangrove. Masyarakat lokal juga merupakan penerima pertama terhadap dampak dan manfaat dari adanya pelestarian hutan mangrove. Sedangkan masyarakat luar memiliki peran yang tidak terlalu banyak dimana masyarakat luar biasanya hanya berperan sebagai relawan pada kegiatan atau acara pelestarian mangrove yang diadakan oleh *stakeholder* lainnya. Dari peran-peran inilah terbentuk suatu model partisipasi dalam pelestarian hutan mangrove, dimana masing-masing *stakeholder* saling berhubungan dan mempengaruhi. Bagan model ini dapat dilihat dalam bab kesimpulan.

Gambar 4. Bagan Motivasi Partisipasi Masyarakat (Analisis, 2019)



Tabel 1. Peran Stakeholder (Analisis, 2019)

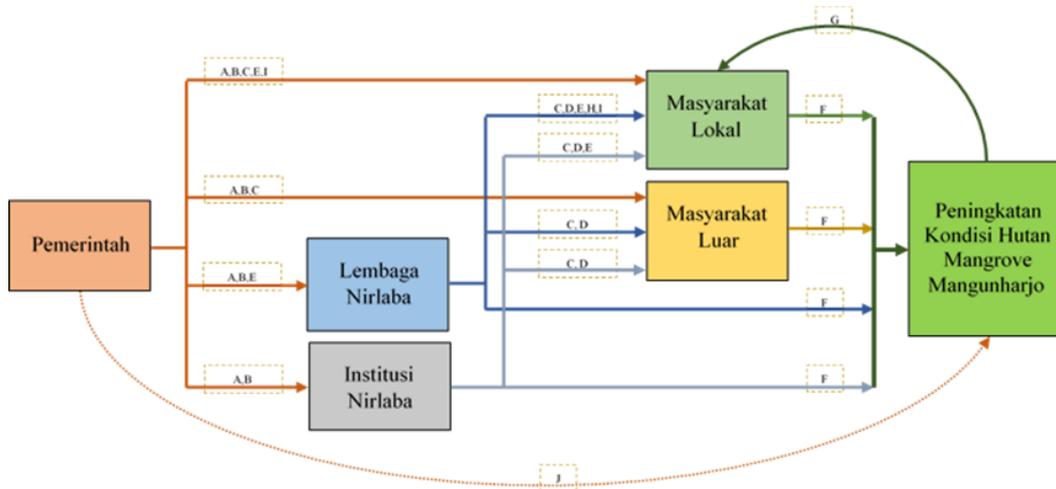
Stakeholder	Peran	Kepentingan	
Masyarakat lokal	Terdiri dari Komunitas atau kelompok mangrove, Pokmaswas, Karang Taruna dan masyarakat diluar lembaga/organisasi.	Berperan sebagai pelaksana yang menjalankan kegiatan, acara atau program yang dibuat oleh <i>stakeholder</i> lainnya. Partisipasi masyarakat lebih banyak dalam komunitas dan kelompok mangrove dimana mereka juga melakukan pengawasan dan turut menjaga hutan mangrove.	Masyarakat lokal memiliki kepentingan sebagai penerima manfaat dan dampak secara langsung dari adanya perubahan kondisi hutan mangrove di Kelurahan Mangunharjo.
Pemerintah - SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perikanan Kota Semarang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Berperan dalam kegiatan penyuluhan, pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait mangrove. Pada awalnya pemerintah jugalah yang membentuk beberapa komunitas, lembaga dan kelompok masyarakat mangrove, seperti Pokmaswas dan beberapa kelompok petani mangrove. Setelah diberikan pelatihan dan penyuluhan barulah selanjutnya tanggung jawab pelaksana dan pengelola diberikan kepada masyarakat, namun tetap dalam pengawasan dan bimbingan pemerintah. Pemerintah juga berperan dalam pemberian ijin mengenai kegiatan, acara atau program terkait pelestarian mangrove yang mempengaruhi kondisi hutan mangrove.	Tanggung jawab yang dimiliki dan diemban oleh pemerintah inilah yang menjadi kepentingan atau landasan bagi pemerintah untuk melakukan pelestarian hutan mangrove.
Lembaga nirlaba atau lembaga non-profit	LSM, Universitas Diponegoro, Universitas Islam Negeri Walisongo, Universitas Negeri Semarang, dan universitas lainnya. Bukan hanya kalangan universitas, tetapi juga mulai dari SD, SMP, hingga SMA.	Berperan dalam mengadakan atau menyelenggarakan kegiatan pelestarian mangrove seperti penanaman mangrove, penyuluhan, dan sosialisasi. Selain itu, berperan sebagai inovator dan pembentuk kelompok penghasil olahan mangrove, dimana lembaga-lembaga ini memberikan inovasi bagi masyarakat lokal khususnya dalam mengolah mangrove menjadi suatu produk yang memiliki nilai jual.	Peran ini didasari oleh adanya kesadaran akan pentingnya turut berpartisipasi dalam pelestarian hutan mangrove. Selain itu, peran ini juga didasari oleh adanya kepentingan pribadi
Institusi nirlaba	Institusi swasta dan publik, contohnya adalah Djarum Foundation, PT. Indosesia Power, dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Semarang.	Berperan dalam bentuk CSR, dimana institusi mengadakan dan membiayai acara pelestarian mangrove seperti penanaman mangrove dan bersih-bersih pantai.	Peran ini didasari oleh adanya tanggung jawab ekonomi, hukum, etika dan sosial perusahaan yang menjadi kepentingan <i>stakeholder</i> ini sehingga berkontribusi dalam melakukan pelestarian mangrove.
Masyarakat luar	Masyarakat yang tidak termasuk warga Kelurahan Mangunharjo secara administratif.	Berkontribusi sebagai relawan pada kegiatan-kegiatan pelestarian hutan mangrove.	Didasari oleh adanya kepentingan pribadi relawan dan adanya kesadaran akan pentingnya turut berpartisipasi dalam pelestarian hutan mangrove.

4. KESIMPULAN

Bentuk partisipasi masyarakat di Kelurahan Mangunharjo terbagi menjadi dua, yang pertama yaitu berupa buah pikiran, aspirasi dan inspirasi serta keahlian atau keterampilan masyarakat yang disalurkan melalui komunitas petani mangrove dan komunitas olahan hasil mangrove. Bentuk partisipasi yang kedua berupa tenaga sebagai relawan bagi masyarakat diluar komunitas dalam kegiatan-kegiatan pelestarian

hutan mangrove. Partisipasi masyarakat lebih banyak dalam komunitas dan kelompok mangrove dimana mereka juga melakukan pengawasan dan turut menjaga hutan mangrove. Partisipasi ini didasari oleh motivasi psikologi dan motivasi ekonomi. Selain itu keberadaan komunitas dan kelompok mangrove juga menjadi motivator bagi masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove.

Gambar 5. Bagan Model Partisipasi (Analisis, 2019)



Keterangan : A= Administrator, B= Regulator, C= Fasilitator, D= Penyelenggara, E= Donatur, F= Pelaksana, G= Penerima dampak dan manfaat pertama, H= Inovator, I= Pembentuk dan pembimbing, J= Penanggung jawab.

Adanya peningkatan yang baik pada kondisi hutan mangrove di Kelurahan Mangunharjo merupakan hasil kerja sama atau kolaborasi yang telah dilakukan oleh *stakeholder* terkait dengan masing-masing perannya. Pemerintah sebagai penanggung jawab atas pelestarian hutan mangrove memiliki peran sebagai regulator dan administrator bagi lembaga nirlaba, institusi nirlaba, masyarakat lokal dan luar. Pemerintah juga berperan sebagai pembentuk dan pembimbing masyarakat lokal, khususnya pada komunitas mangrove dan pokmaswas. Selain itu pemerintah juga berperan sebagai fasilitator bagi masyarakat lokal maupun luar dan berperan sebagai donatur dalam beberapa kegiatan lembaga nirlaba dan masyarakat lokal. Lembaga nirlaba berperan sebagai fasilitator bagi masyarakat lokal maupun luar ketika menyelenggarakan acara dan menjadi donator dalam pelestarian mangrove. Lembaga nirlaba juga berperan sebagai inovator, pembentuk dan pembimbing bagi masyarakat lokal khususnya pada kelompok pengolah hasil mangrove. Institusi nirlaba memiliki peran yang hampir serupa dengan lembaga nirlaba, yaitu sebagai fasilitator bagi masyarakat lokal dan luar ketika menyelenggarakan dan menjadi donator dalam acara atau kegiatan pelestarian hutan mangrove di Kelurahan Mangunharjo. Masyarakat lokal merupakan *stakeholder* yang memiliki peran paling penting dan paling banyak dalam pelestarian hutan mangrove di Kelurahan Mangunharjo, dimana masyarakat lokal berkontribusi secara langsung dalam kegiatan-kegiatan pelestarian mangrove. Masyarakat lokal juga merupakan penerima pertama terhadap dampak dan manfaat dari adanya pelestarian hutan mangrove. Masyarakat luar memiliki peran yang tidak terlalu banyak dimana masyarakat luar biasanya hanya berperan sebagai relawan pada kegiatan atau acara pelestarian mangrove yang diadakan oleh *stakeholder* lainnya.

5. REFERENSI

- Alongi, D.M., 2002. Present state and future of the world's mangrove forests. *Environmental conservation*, 29(3), pp.331–349.
- Bengen, D.G., 2001. Ekosistem dan sumberdaya pesisir dan laut serta pengelolaan secara terpadu dan berkelanjutan. *Prosiding pelatihan pengelolaan wilayah pesisir terpadu*. Bogor, 29.
- Bungin, B., 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Cetakan ke-8. *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*.
- Dwiyanto, A., 2005. *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*, Gajah Mada University Press.
- Emzir, M. & Pd, M., 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis data. *Jakarta: Raja Grafindo*.
- Fatah, A., 2014. *Mitigasi dampak abrasi air laut pada masyarakat petani tambak (Studi kasus budidaya tanaman mangrove di kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang tahun 2014)*. IAIN

Walisongo.

- Gumilar, I., 2018. Partisipasi masyarakat pesisir dalam pelestarian ekosistem hutan mangrove (Studi kasus di Kabupaten Indramayu Jawa Barat). *Sosiohumaniora*, 20(2), pp.145–153.
- Huda, N., 2008. *Strategi kebijakan pengelolaan mangrove berkelanjutan di wilayah pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi*. program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Huraerah, A., 2008. *Pengorganisasian dan pengembangan masyarakat: model dan strategi pembangunan berbasis kerakyatan*, Humaniora.
- Manaf, A. et al., 2018. Community-based rural tourism in inter-organizational collaboration: How does it work sustainably? Lessons learned from Nglanggeran Tourism Village, Gunungkidul Regency, Yogyakarta, Indonesia. *Sustainability*, 10(7), p.2142.
- Mandasari, N.A. & Maesaroh, M., 2016. Pengaruh Persepsi Dan Motivasi Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa Hutan Dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Phbm) Di Kawasan Bkph Guwo (Studi Penelitian Di Lmdh Wonosari, Sumber Agung, Wono Makmur Dan Tunas Rimba). *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(4), pp.313–329.
- Martuti, N.K.T. et al., 2018. Peran kelompok masyarakat dalam rehabilitasi ekosistem mangrove di pesisir Kota Semarang. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 6(2), pp.100–114.
- Muhammad, I., 2007. Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif).
- Nurdiani, N., 2014. Teknik sampling snowball dalam penelitian lapangan. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 5(2), pp.1110–1118.
- Nurhidayati, S., 2017. Kondisi Mangrove dan pengelolaannya di Kota Semarang. Available at: <http://mangrovemagz.com>.
- Peranginangin, L.S.U., 2014. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 18(1), pp.66–78.
- Romañach, S.S. et al., 2018. Conservation and restoration of mangroves: Global status, perspectives, and prognosis. *Ocean & Coastal Management*, 154, pp.72–82.
- Sugiartha, K., 2015. Klasifikasi Model. Available at: <http://sugiartha.staff.gunadarma.ac.id>.
- Suryana, 2010. *Metodologi Penelitian*, Depok: Universitas Indonesia.
- UNPAN, 2013. UN Public Administration Glossary. Available at: www.unpan.org.
- Wahyudi, A., Hendrarto, B. & Hartoko, A., 2014. Penilaian kerentanan habitat mangrove di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang terhadap variabel oseanografi berdasarkan metode cvi (coastal vulnerability index). *Management of Aquatic Resources Journal*, 3(1), pp.89–98.